



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDIONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 466088

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/108 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/36 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 110.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 433.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 47.601.352**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.566.101.352**

III. HUTANG **Rp. 91.439.139**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 4.474.662.213**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.